

ABSTRACT

POLITICS MILITARY IN POST – NEW ORDER INDONESIA

By:

RIFQA DENI AMANAH

0901120004

Adviser By :

Dr. Hasanuddin M.Si

Post New Order Indonesian Politics which emphasize of changes in military problems in politics. Especially in the Indonesian Government. Civil-Military System that still overlap in politics. That is caused from the larger role of the military in Indonesia during The New Order.

This research have to look at the changing role and function of the military who make changes like Redefinition, Repotoning, and Reactualitation. Along with research the factors that influence of changes in the Government transition procces in post-New Order in Indonesia.

Basis of analysis research it can be concluded that Indonesia military is always undergoing a procces of change in the each government transition. So that military politics always has a different system and adapted according to the prevailing system of government. Indonesia's government in politics has not been able break away from the military, is caused because a several factors, especially on the weak civilian control and professional moral value that always different allowing to the comprehension of the military institution itself.

Keywords : Government Transition, Politics, Military Politics

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Militer di suatu negara identik pasang surut, ada kalanya sehat dan ada kalanya menegangkan bahkan buruk. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara sipil dan militer sebagai permasalahan yang abadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Kontrol sipil yang tidak obyektif merupakan landasan awal militer berani masuk dan memberikan pengaruh terhadap politik. Otoritas sipil belum mampu menerapkan kontrol yang kuat atas kebijakan militer dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengaruh militer dengan multi fungsinya terhadap alam politik pemerintahan salah satunya lebih disebabkan oleh sejarah perjuangan bangsa dan Negara yang bersangkutan, terutama di negara dunia ketiga termasuk Indonesia.

Secara historis militer di Indonesia dalam pencarian bentuknya mengalami beberapa kali perubahan nama yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Negara. Militer Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan militer di negara lain, terbentuk melalui perjuangan kemerdekaan. Perjuangan dilakukan tidak hanya bertempur secara fisik tetapi terlibat dalam penyusunan strategi pendirian bangsa Indonesia. Sehingga fungsi militer dan politik tidak mempunyai batasan yang jelas. Permasalahan ini yang mengakibatkan militer Indonesia terjun ke dalam politik. Periodisasi pemerintahan di Indonesia memiliki ciri-ciri yang berbeda, terutama pada kasus militer dalam politik. Dimulai dari Orde lama, sampai pada era Orde Baru dimana militer memiliki dua peran besar dalam pemerintahan yang dikenal dengan Dwi Fungsi ABRI.

Persepsi ABRI yang seperti itu dianggap keliru, dengan praktek selama 32 tahun yang dianggap gagal, menjadikan Orde baru kehilangan legitimasinya. Menuntut adanya reformasi total dengan mengusung isu-isu demokratisasi dan mereduksi peran militer dalam tanggung jawab sosial dan politik, atau dengan mengembalikan TNI ke dalam fungsinya (*repositioning*) dan redefinisi dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, dan tidak ikut campur dalam fungsi sosial politik. Roda pemerintahan yang terus berputar pasca Orde Baru dengan beberapa transisi pemerintahan kepresidenan dimulai B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, menempatkan militer sebagai organisasi Negara yang memiliki perhatian khusus pada perannya dalam politik di Indonesia.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan peran dan fungsi Militer dalam Politik Indonesia pasca Orde Baru?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses perubahan Militer dalam Politik Indonesia pasca Orde Baru sejalan dengan transisi Pemerintahan di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Prasyarat sebuah negara yang demokratis, menurut Huntington (1993) adalah bebasnya politik dari intervensi-intervensi militer. Tuntutan sebuah proses politik yang demokratis dan bebas dari intervensi militer, menjadikan posisi militer harus diterjemahkan secara tepat. Pembahasan lain dari Huntington (1968), militer tidak boleh mendapatkan posisi yang kuat sebagai praetorian guard atau penjaga stabilitas rejim, karena rawan disalahgunakan fungsi-fungsinya oleh tindakan-tindakan personal. Dengan kata lain, militer yang memiliki peran besar dalam politik cenderung selaras dengan kediktatoran dan personalisme politik. Militer tidak berurusan dengan politik, tetapi politik tidak dapat lepas dari urusan-urusan militer seperti kebijakan tentang keamanan nasional. Karena itu bahwa militer berkewajiban menjalankan tugas-tugas pengamanan Negara atas dasar kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh politik. (Huntington, 1981)

Dirangkum oleh Almos Perlmutter (1998:167) bahwa motivasi tentara untuk melakukan campur tangan jelas adalah politik, bahkan kalau ia di dorong oleh kondisi-kondisi sosial yang tidak di lembagakan. Almos Perlmutter juga menyebutkan ada dua kondisi yang bisa memberikan kesempatan bagi militer untuk melakukan intervensi.

Pertama, kondisi sosial, Suatu Negara yang kondisi sosialnya lemah maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi yang sangat tinggi. Dan kalau struktur Negara lemah maka institusi-institusi politik tidak berfungsi efektif dan demikian control sosial tidak efektif dan mengakibatkan militer memiliki peluang untuk melakukan intervensinya.

Kedua, kondisi politik. Intervensi militer muncul dari persoalan sipil. Dalam banyak kasus kembalinya militer dikarenakan sipil meminta dukungan ketika struktur politik terfragmentasi dalam faksi-faksi politik dan perangkat konstitusi tidak berjalan.

Eric A. Nodlinger, juga melihat kemungkinan adanya peran politik yang dimainkan oleh korps perwira, dalam hal ini Nodlinger membagi dalam tiga kategori peran yaitu moderator, guardians, dan rullers. Militer berkarakter moderator manakala hubungan sipil-militer sangat cair. Bidang politik dan pemerintahan dipegang oleh sipil yang mempunyai patron atau back-up dari militer. Guardians mengacu pada peran militer sebagai pengawal dan pengawas jalannya pemerintahan. Militer terlibat dalam bidang politik hanya pada tataran yang makro-strategis. Kategori rullers adalah keadaan ketika militer menguasai semua bidang terutama bidang politik, dalam konteks inilah dapat menimbulkan sebuah rezim militer.

Agenda pendemokratisasian sangat terkait dengan upaya mereduksi peran militer dalam bertanggung jawab sosial dan politik, kalau tidak menghilangkan sama sekali, yaitu mengembalikan TNI ke dalam fungsinya (repositioning) dengan meningkatkan azas-azas profesionalisme.

Ahli militer Indonesia, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (1996) menyatakan bahwa seorang prajurit yang professional mempunyai kriteria sebagai berikut; 1. Seorang patriot, 2. Seorang komandan, 3. Seorang Pembina (manajer), 4. Seorang pemikir (strategist and tactician), 5. Seorang yang ahli pada bidangnya atau kecabangannya. Selain itu, sosok dan kriteria seorang prajurit TNI yang professional sesuai dengan hakikat dan filsafat Tri sakti Wiratama, yaitu (1) harus mempunyai mental yang tangguh, (2) intelegensi yang tinggi, dan (3) fisik yang kuat. Pendapat selanjutnya, tolak ukur profesionalisme prajurit yaitu apabila mampu mengemban tugas pertahanan Negara dengan baik, disiplin, loyal, dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan setiap tugas yang di percayakan hanya karena motivasi panggilan, pengabdian demi kepentingan bangsa dan Negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan atau kepentingan politik tertentu.

Definisi Konsep

Dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perspektif politik, militer adalah alat Negara untuk mencapai tujuan Negara, baik itu internasional ataupun lokal yang diberikan legalitas untuk melakukan kekerasan bahkan kepada penduduk sipilnya yang dianggap pemerintah membahayakan eksistensi Negara

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang diangkat adalah penelitian Kualitatif, dikarenakan masalah Militer dalam politik dianggap belum jelas, holistik, kompleks, dinamis. Selain itu peneliti bermaksud memahami secara mendalam dengan menemukan pola dan teori yang ada dalam masalah Militer dan Politik. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cara menghimpun buku, makalah dan Koran, dan lain lain yang sesuai dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Librari Research atau Studi Pustaka. Yakni dengan cara pengumpulan data dengan menghimpun buku-buku, makalah, dan dokumen serta sarana informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi. Data- data yang terkumpul baik yang berasal dari data pustaka dan sumber lain ditampikan dalam bentuk uraian dengan cara sistematis dan kemudian dikasifikasikan dalam hubungan yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan batasan-batasan dalam Militer dan Politik di Indonesia, menguraikan tuntutan-tuntutan kepada Militer pada Era Orde Baru terkait masalah merosotnya peran dan tanggung jawab militer bagi Negara, kegagalan pemerintahan Orde baru, dan Reformasi yang terjadi pada pasca orde baru dengan memprofesionalkan militer dalam urusan politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. MILITER DALAM POLITIK PASCA ORDE BARU

Seiring dengan awal mula reformasi yang diwarnai tuntutan pada penghapusan Dwifungsi ABRI dan menjadikan rezim Orde baru jatuh, Pemerintahan mengalami beberapa transisi pergantian dan mejadikan Negara lebih demokratis, mengadakan pemilu dalam pemilihan Presiden, untuk menghindari kekuasaan Presiden yang berlangsung lama seperti masa Presiden Soeharto.

1. Peran Militer Pada Masa B.J. Habibie

Dalam pemerintahan sipil dibawah presiden B.J. Habibie, kebijakan yang ditempuh dalam mengelola hubungan sipil-militer relatif masih sama dengan periode Presiden Soeharto. Militer pada masa B.J. Habibie tidak lain adalah militer warisan Presiden Soeharto yang peran politiknya hanya pada tingkat doktrin. Organisasi TNI masih sepenuhnya dibawah kendali Panglima Tinggi TNI yang dipimpin oleh Jendral TNI Wiranto.dengan mendukung penuh kepemimpinan Habibie dengan memanfaatkan kesempatan besar. Pada tanggal 22 Mei , kesempatan pertama Habibie dalam meningkatkan legitimasinya, Pengurangan jumlah anggota ABRI yang duduk di MPR dari 75 menjadi 38 kursi . Kebijakan lain dengan diakhirinya praktik perwira perwira militer aktif yang menduduki jabatan-jabatan non militer. Selain itu juga militer secara struktural melakukan pemutusan hubungan dengan Golkar. Perubahan nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada bulan April 1999.

Tetapi perubahan yang telah terjadi di pusat belum tersosialisasikan sampai pada tingkat daerah. Keberadaan komando territorial yang berada di daerah berdiri sejajar dengan pemerintahan sipil dengan pengaruh yang kuat. Maka melihat dari Pandangan Huntington tentang konsep kontrol sipil yang dilakukan pemerintahan Habibie mengarah kepada memaksimalkan profesionalisme militer dan menunjukkan adanya pembagian kekuasaan politik antara kelompok militer dan sipil yang kondusif menuju perilaku professional. Dengan Objective civilian dibawah pengawasan jenderal TNI masa itu Wiranto.

2. Peran Militer Pada Masa Abdurrahman Wahid

Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden menggantikan Habibie, dengan proses depolitisasi militer dengan pola hubungan sipil-militer mengarah kepada supremasi sipil dengan intervensi nya yang besar . Perubahan yang dilakukan Presiden di masa itu dilihat dari bagian reformasi politik dengan menciptakan terminologi supremasi sipil. Berikut beberapa kebijakan dalam implikasi penting terhadap hubungan sipil-militer pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, terutama di bidang pertahanan:

- a. Pemisahan Departemen Pertahanan (sekarang dikenal dengan Kementerian) , dibagi menjadi 2. Departemen Pertahanan mengurus isu keamanan yang terkait pada ancaman intervensi militer luar negeri, sedangkan pada sector Keamanan dimasukkan dalam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhumkam). Keamanan yang diatur oleh kementerian ini di fokuskan kepada pengurusan isu-isu domestik yang mengarah pada keamanan sipil. Tanggung jawabnya sendiri di bebaskan pada institusi sipil, seperti : POLRI dan Satpol PP.
- b. Pasca Orde Baru, dalam sejarah pertama kalinya mengangkat seorang Menteri Pertahanan yang berasal dari kalangan sipil dan sama sekali tidak memiliki latar belakang Militer dan juga bukan seorang Purnawirawan Militer, yaitu Prof. Dr. Juwono Sudarsono (1999-2000) dan Prof. Mahmud MD (2000-2001).
- c. Pemisahan antara TNI dan POLRI . Pada masa sebelumnya dimana TNI memiliki empat angkatan, yaitu : Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Kemudian oleh Presiden dipisahkan, dan TNI menjadi struktur kelembagaan tersendiri yang Mandiri.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid , masalah pemberhentian ataupun pengangkatan pejabat militer, relatif cenderung di bawah kendali Presiden, Meskipun pengaruhnya tidak sebesar Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid dalam hal ini mengklaimnya sebagai upaya penegakkan supremasi sipil juga sebagai upaya meminimalisasi dominasi peran politik militer. Namun intervensi Presiden Wahid yang terlalu jauh dalam masalah internal TNI dan patronase yang diberikannya, puncaknya terjadi setelah Presiden Wahid mengeluarkan Dekrit pada 23 Juli 2001, TNI pun tidak mematuhi isi dekrit tersebut.

Dalam kaitan hubungan sipil-militer menurut teori Huntington, militer pada masa Abdurrahman wahid dapat diklasifikasikan pada control sipil subyektif (subjective civilian control), karena Abdurrahman Wahid mengkondisikan kekuasaan presiden sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengontrol militer.

3. Militer Masa Pemerintahan Megawati

Sikap konservatif dari presiden dengan tidak mencari urusan militer merupakan kunci dalam melakukan konsolidasi. Pemerintahan yang baru lebih memerhatikan peran militer secara fungsional dengan masalah yang berkaitan dengan keamanan, separatisme dan integrasi teritorial.

Pada masa pemerintahan Megawati perubahan yang paling terlihat dalam membatasi peran militer dalam politik antara lain, Perwakilan ABRI di MPR/DPR dihapus. Jabatan menteri, gubernur, dan bupati tidak ada lagi dari kalangan militer. Keluarnya fraksi TNI/POLRI setelah

pemilu 2004, dan sejak 2004 institusi TNI dan POLRI meninggalkan panggung politik di MPR, DPR, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal lain dalam reformasi TNI dengan disahkannya RUU TNI menjadi Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara nasional Indonesia pada 30 September 2004.

Berbagai ancaman terjadi dalam masa pemerintahan Megawati sehingga meningkatkan dependensi sipil terhadap militer, megawati melibatkan militer secara besar dalam penanganan konflik di daerah. Dilihat dari kebijakan megawati yang khusus kepada militer,menitik beratkan pada teori Huntington yang mengarah ke subjective civilian control dimana sipil pada masa pemerintahan Megawati lebih banyak meminta dukungan kepada militer dengan berbagai alasan yang sudah di kemukakan di atas. Megawati di awal ingin menjalin kerjasama antara sipil dengan militer yang baik, namun ternyata hal ini di jadikan kesempatan bagi militer dalam membentuk sebuah kekuatan politik mereka sesuai dengan sejarah masa lalu militer itu sendiri.

4. Militer masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Hubungan sipil-militer pada masa ini lebih mengarah ke bentuk yang ideal , dengan sipil sebagai pemegang control dalam pemerintahan SBY. Supremasi sipil yang dilakukan dalam menjaga hubungan keharmonisan antara sipil dan militer, hal ini sangat disesuaikan dengan pokok-pokok pemikiran SBY yang dikenal sebagai tentara Reformis dengan menegakkan nilai-nilai profesionalisme Tentara. Langkah SBY dalam menjaga hubungan sipil-militer dengan profesionalitas militer tidak terlepas dari penempatan kepada orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam pemahaman sipil dan militer. Seperti Prof. Dr. Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan mendapat mandat dari Presiden Yudhoyono untuk melakukan dua hal , yakni menjaga netralitas TNI dan penertiban sistematis mengenai pengadaan Alutsista di Departemen Pertahanan.

Keberhasilan pemerintahan Yudhoyono dalam membatasi peran militer dalam politik terhadap hubungan sipil-militer disebabkan oleh pendekatan control sipil obyektif (objective civilian control) menurut Huntington. Dengan rekam jejak Yudhono sebagai penggerak reformasi internal dari tubuh TNI. Presiden juga menghindarkan diri terlibat lebih jauh dalam masalah internal TNI . Militer pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhono lebih berkarakter sebagai Moderator, Presiden Susilo memiliki back up militer dan menjadikan militer mempunyai batasan yang jelas dalam pemerintahan.

B. FAKTOR- FAKTOR PERUBAHAN MILITER PASCA ORDE BARU

Penyebab pengaruh perubahan peran militer dalam politik Indonesia pada masa reformasi, yang pada intinya disebabkan oleh 2 faktor: Faktor Internal dan Eksternal serta Paradigma Baru TNI. Merupakan langkah awal yang positif dengan menghadirkan harapan baru bagi terbangunnya TNI yang fungsional dan profesional.

1. Faktor Eksternal

a. Berkembangnya Demokrasi di Indonesia

Demonstrasi mahasiswa dengan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998 dengan pendudukan gedung MPR merupakan gejala demokrasi yang paling besar di masa itu, hal ini menjadi faktor kumulatif bagi kejatuhan Presiden Soeharto. Lengsernya Soeharto sebagai tonggak awal proses reformasi di Indonesia. Semangat demokratisasi telah menggerakkan masyarakat tersebut untuk melakukan perubahan politik dan reformasi terhadap semua kekeliruan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, termasuk di dalamnya penghapusan Dwifungsi ABRI.

b. Tuntutan Kelompok Reformis

Era Reformasi pada Mei 1998 mendorong masyarakat dalam menyuarakan secara keras kesalahan-kesalahan ABRI di masa lalu. Peran ganda ABRI dianggap sebagai penyebab utama terkooptasinya militer oleh kekuasaan dan menjadi alat politik Soeharto. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga survey Cesda (Center for the Study of Development and Democracy) dan LP3ES pada Agustus 1998, bahwa 74,3% dari total responden (1000 orang) menghendaki agar ABRI hanya berperan dalam mempertahankan Negara. 3,8% responden menilai ABRI berpihak kepada rakyat, sementara 56,1% melihat ABRI lebih berpihak kepada penguasa. Hasil jajak pendapat lain yang dilakukan Kompas dengan 1.329 responden via telepon, pada awal Oktober memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Sebanyak 81% setuju ABRI hanya menjaga alat pertahanan dan keamanan, serta 62% melihat citra ABRI secara umum dengan buruk. Kelompok Moderat yang hadir sebagai pengkritik ABRI dalam masa transisi menganggap masa ini adalah waktu yang tepat dalam melakukan perbaikan sistem politik.

Penuntut dilaksanakannya reposisi ABRI dengan keras datang dari kalangan kritis di masyarakat, aktivis, maupun kelompok pro demokrasi dan mahasiswa. Kelompok aksi yang mewakili garis paling radikal dari gerakan-gerakan mahasiswa yaitu Forum Kota (Forkot), Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), dan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Dan beberapa tuntutan lain yang dilakukan dalam diskusi dan seminar terkait tentang militer.

c. Kebijakan atau Produk Hukum

Dalam ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, TNI ditetapkan sebagai alat pertahanan Negara yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara, serta melaksanakan tugas Negara dalam penyelenggaraan wajib militer.

Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan beberapa kali revisi menjadi landasan hukum bagi anggota militer untuk membatasi peran-perannya agar tidak keluar dari jalurnya.

2. Faktor Internal

Pandangan kritis tentang ABRI dengan dwifungsinya bukan saja datang dari faktor eksternal, tetapi juga internal dari badan TNI itu sendiri. Pandangan kritis dari internal TNI terhadap reformasi sebenarnya sudah ada sejak tahun 1998 terhadap dwifungsinya dan implementasinya sudah ada.

Profesionalitas yang dikembangkan oleh TNI pada dasarnya bukan diarahkan pada profesionalitas yang dikemukakan Huntington, antara lain yang bercirikan keahlian dengan tingkat keterampilan militer yang tinggi. Profesionalitas yang dikembangkan lebih mengarah pada pendalaman dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial politik yang dibuktikan dari berbagai pandangan yang berkembang baik dari institusi militer.

Tabel 1.1

Proses Reformasi Internal dalam Rujukan Waktu

Tahapan Sasaran	Jangka Pendek	Jangka Sedang	Jangka Panjang
	0 – 3 Tahun	4 – 7 Tahun	8 – 12 Tahun
Dwifungsi (Peran Sospol)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggalkan Peran Sospol • Tanggalkan Kekaryaan • Likuidasi Institusi Sospol • Bin KB TNI & Korpri Fungsional Spers 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuidasi Fraksi TNI/POLRI • Implementasi Paradigma baru TNI yang lebih bersifat menjangkau ke masa depan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak dan kewajiban politik sebagai perseorangan warga negara • Institusi menjalankan Pol Neg (Han) • Likuidasi FTNI/POLRI MPR • TNI Lepas dari politik
Fungsi Teritorial	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan konsepsi Reung & Restruk Ter. • Pembahasan lintas sektoral • Reorientasi & internalisasi • Penyusutan selektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Turdang Alih Fungsi • Penyiapan institusi pengganti • Penataan organisasi • Penyusutan selektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pematapan transisi dilanjutkan dengan pelaksanaan Binpotnas di Daerah untuk mendukung fungsi Han scr Fungs. Sesuai dengan tata cara kewenangan
Struktur dan Doktrin	<ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan POLRI dari TNI • Penyelesaian Turdang Han • Penjabaran UU terkait • Validasi organisasi dan doktrin TNI sebagai alat Han • Transisi piranti lunak sistem peradilan • Likuidasi Kaster TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • Reorientasi dan restrukturisasi organisasi TNI • Evaluasi validasi • Likuidasi staf kosmos • Pemantapan sistem peradilan • Susunan UU TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur dalam fungsi Han cerminkan Doktrin Gab • Doktrin kesemestaan sbg doktrin nasional • Postur TNI Profesional, efektif, efisien, modern (PEEM)
Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan akuntabilitas publik terhadap yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer • Pemberdayaan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Badan Usaha Kesejahteraan prajurit 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan prajurit melalui manajemen profesional dan transparan
Kultur	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peran TNI • Pergeseran ke paradigma baru TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi k/Kurikulum Pendidikan • Memformulasikan sikap yang lebih adaptif & kontekstual terhadap perubahan nilai & kultur 	<ul style="list-style-type: none"> • Prajurit profesional • Tegak hukum & harga HAM • Harga kewenangan Pemerintah • Konstitusional

Sumber : Paradigma Baru TNI & Reformasi Internal Lanjutan TNI (Tahap II)

Dalam tubuh TNI sendiri , seperti halnya perwira TNI, Panglima TNI pada saat awal reformasi bergulir Jenderal TNI Wiranto dan Kasospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai buku yang dikeluarkan perwira TNI dalam menanggapi masalah perubahan dari internal militer. Berikut adalah pemikirannya, Jenderal TNI Wiranto dalam bukunya Bersaksi di Tengah Badai, Dari catatan Wiranto (2003: 101) menyatakan bahwa reformasi internal ABRI merupakan suatu keharusan. Mengatasi Krisis, Menyelamatkan Reformasi buku dari Susilo Bambang Yudhoyono (2000:68-69), dalam evaluasinya menyampaikan bahwa terdapat tindakan yang salah dari TNI di masa lampau termasuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tetapi tidak berarti semua merupakan kesalahan TNI. Semua yang dilakukan TNI adalah bagian dari format politik Orde Baru. TNI sadar akan kesalahan tersebut dan akan menjadi bagian dari reformasi.

Mayjen TNI Agus Widjaja dalam Makalahnya “ Peran ABRI Abad XXI, Paradigma Baru’ 1998 menyatakan bahwa kesadaran internal TNI merupakan faktor penting bagi terlaksananya Reformasi TNI. Kemunculan kesadaran internal TNI disebabkan oleh kesadaran dan nurani sebagai sikap apresiatif internal ABRI dan juga disebabkan oleh desakan perkembangan lingkungan.

Kemudian terbit buku yang serupa yaitu Indonesia Baru dan tantangan TNI, Pemikiran masa Depan (1999), yang ditulis Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah, M.PA (terakhir menjabat sebagai Letjen TNI). Dalam buku ini lebih menjurus membahas pemikiran tentang Paradigma Baru dan Reformasi ABRI/TNI sebagai bagian dari reformasi nasional. Agus Wirahadikusumah memberikan batasan dengan empat pokok hal yang berkaitan dengan reformasi menuju Indonesia Baru, yaitu pertama, perlunya menumbuhkan kesadaran baru di kalangan TNI melalui reevaluasi doktrin yang membuat TNI terlenta; kedua, perubahan orientasi dan konteks dari Negara kepada masyarakat terhadap implikasinya; ketiga, transformasi peran TNI; keempat, perubahan yang sangat menonjol dari struktur masyarakat sebagai proses yang lebih relevan sebagai masyarakat bangsa yang pluralistik.

3. Paradigma Baru Reformasi TNI

Sejalan dengan reformasi Internal sebagai proses penataan institusionalnya, secara dinamis pula TNI merumuskan Paradigma Baru atas perannya ke depan.

Pada Hari Ulang Tahun ABRI ke-53 ABRI Mabes TNI menerbitkan buku TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, dan reaktualisasi Peran TNI dalam kehidupan Bangsa. Dalam hal ini sebagai model untuk meninjau dan mengubah secara menyeluruh hal-hal yang meliputi fungsi dan tugas ABRI/TNI di masa mendatang.

a. Redefinisi

Redefinisi merupakan salah satu bagian dan perubahan dalam proses Reformasi Internal ABRI/TNI yaitu dengan menghapus dan mengganti Dwifungsi ABRI yang selama ini dipandang menjadi persoalan utama bias-bias peran dan fungsi ABRI/TNI di masa lalu, terminologinya diganti menjadi Peran ABRI. Adapun alasan perubahan itu dijelaskan : Dalam hal ini untuk menghindari kesalahan yang selama ini identikkan dengan kekaryaannya. Istilah peran ABRI, mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi Hankam dan sosial politik, sehingga menghilangkan kesan adanya dikotomis dan distingtif kedua fungsi tersebut (Mabes TNI, Paradigma Baru Peran TNI, 1999).

Dengan demikian tidak ada lagi dikotomi peran yang dipikul TNI, yaitu pernisahan antara fungsi atau peran di bidang Hankam dan bidang Sospol. Yang ada hanyalah Per-an ABRI, tidak ada lagi Dwifungsi ABRI. Dan ini diharapkan bias-bias implementasi peran ABRI/TNI di lapangan dapat dihindari.

b. Reposisi

Reposisi diformulasikan sebagai penataan posisi ABRI yang diletakkan pada wacana kehidupan bangsa, yang berpangkal dan berujung pada titik kebebasan dan transparansi sebagai kosakata reformasi dengan ketertiban dan kepastian sebagai pagar kebebasan. Pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI disamping proaktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis, ABRI juga concern dalam pembangunan nasional.

c. Reaktualisasi.

Dalam reaktualisasi akan dituangkan upaya penataan kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen ABRI untuk menerapkan perannya dengan

mencermati , mengakomodasi dan menyesuaikan di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

Poin perubahan dalam proses dan progress Reformasi TNI telah tertuang dalam beberapa Surat keputusan (Skep), Surat perintah (Sprin), Surat Telegram (STR), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Panglima TNI, Keputusan Presiden (Keppres), Tap MPR-RI dan Undang- Undang. Demikian poin-poin perubahan tersebut menjadi suatu kepastian karena jelas memiliki payung hukum.

Daftar Pustaka

A. Daftar Buku

- Anwar, Dewi Fortuna dkk, *Gusdur Versus Militer, Studi Tentang Hubungan Sipil — Militer di Era Transisi*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Apter, David, E, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta, CV.Rajawali, 1995
Ahmadi, Abu, *Kamus Lengkap Sosiologi*, Solo, CV.Aneka, 1990
- Bakrie, Connie Rahankundi. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Basuki, Ahmad Yani. 2013. *Reformasi TNI : Pola, Profesionalisme dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat (Kajian Historis di masa krisis 1998-2007)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Bhakti, Ikrar Nusa . 2001. *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Bandung : Mizan dan PPW LIPI.
- _____ . 1999. *Tentara yang gelisah*, Bandung : Mizan
- Busyairi, B. 2012 *Tiga Kota Satu Pengabdian*, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Chrisnandi, Yudhi. 2005. *Reformasi TNI (Perspektif Baru Hubungan Sipil Militer di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Desch, Michael C, *Politisi VS Jenderal, kopntrol Sipil atas Militer Di Tengah Arus Yang Bergeser*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Diamond, Lary. 2001. *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Editor : Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Islam dan Reformasi TNI*, Yogyakarta, PT.Tiara Wacana Yogya, 2000
- Effendy, Muhadjir. 2011. *Profesionalisme Militer; Profesionalisasi TNI*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- _____. 2009. *Jati Diri dan Profesi TNI*. Malang : UMM Press
- Eko, Sutoro. 2003. *Transisi Demokrasi di Indonesia Runtuhnya Rezim Orde Baru*. Yogyakarta : Penerbit APMD Press.

- Fatah, Eep Saefullah. 2000, Zaman Kesempatan, Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru, Bandung : MIZAN
- _____, 1999. Membangun Oposisi, Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
- Haramain, A. Malik. 2004. Gusdur, Militer dan Politik. Jakarta :PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Haris, Syamsuddin. 1998, Menggugat Politik Orde Baru, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti,
- Hoogerwef, Politikologi (Pengettian dan Problem-problemnya), Jakarta, Erlangga, 1985
- Hiariej, Erick. 2004. Politik Transisi Pasca Soeharto. Yogyakarta : Penerbit FISIPOL UGM
- Ibrahim, S . 2012. Profesionalisme Tentara Era SBY : Dan agenda Reformasi Kepada Kegagalan Misi. Malaysian Journal of history, vol 39, No.1
- Irawan,Bambang. 2000. Supremasi Sipil? : Agenda Politik Militer Gusdur . Jakarta: Penerbit Elst Reba.
- Kecik, Hario. 2013. Dari Bung Karno Hingga Jokowi (Pemikiran Militer Hario Kecik : Catatan November 2011-September 2012). Yogyakarta : Penerbit Abhiseka Dipantara
- Lemhannas. 1999. Hubungan Sipil Militer (Peran dan Kontribusi Tanggung Jawab Sipil Militer dalam Penyelenggaraan Negara. Jakarta: PT. Gramedia.
- Maarif, Syamsul. 2011. Militer dalam Parlemen 1960-2004. Jakarta: Prenada Media Group.
- Magunwijaya, YB, Tentara dan Kaum Bersenjata, Jakarta, Erlangga, 1999
- Maniruzzaman, Talukder, Militer Kembali Ke Barak, Yogyakarta, PT.Tiara Wacana Yogya, 1998
- Mietzner, M. 2006. The Politics of Military Reform in Post-Soeharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalis, and Institutional Resistance. Washington : East West Center.
- Muhaimin, A. Yahya. 2005. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Mulkan, Abdul Munir. 2001. Kiai Presiden Islam dan TN1 di Tahun tahun Penentuan, Yogyakarta UII Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. Pejuang dan Prajurit (Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI). Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- _____. Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia, dalam buku Analisa kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1991
- Nugroho, Adi & Bobby Batara. 2013, Jenderal di Gelombang Reformasi Syarwan Hamid. Siak
- Perlmutter, Almos. 2000, Militer dan Politik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerwodarminta, WJS. 1987, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

- Partowisastro, Koestoer, *Dinamika Psikologi Sosial*, Jakarta, Balai Pustaka, Erlangga, 1983
- Prihatono, T. Hari, dan Jessica Evangeline, dan Iis Gindarsah. 2007. *Keamanan Nasional : Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaraan politik dan Kebijakan*. Jakarta : Propatra Institute
- Pusat Penelitian Politik, year Book. 2005. *Politik BBM*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Raga Maran, Rafael, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi departemen Pendidikan Nasional
- Rinakit, Sukardi. 2005 *The Indonesia Military After The New Order*. Malaysia : NIAS Press
- Said, Salim. 2001. *Wawancara tentang tentara dan Politik*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan
- _____. 2006. *Militer Indonesia dan Politik Dulu, Kini, dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Samego, Indria. 1998. *Bila ABRI Menghendaki*. Bandung, Penerbit Mizan
- _____. 2000. *TNI Di Era Perubahan*, Jakarta, Erlangga.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (editor). 1995. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES.
- Singh, Bilver. 1995. *Dwifungsi ABRI, Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Suasta, Putu. 2013. *Menegakkan Demokrasi Mengawal Perubahan*, Jakarta : Lestari Kiranatama.
- Sundhaussen, Ulf, 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI*, Jakarta, LP3ES.
- Sukma, Rini dan J.Kristiadi (penyunting). 1999. *Hubungan Sipil Militer Dan Transisi Demokrasi Di Indonesia, Persepsi Sipil Dan Militer*, CSIS, Jakarta.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 1992. *Pancasila, Islam Dan ABRI, buah renungan seorang prajurit*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo. 1992 *Golkar Dan Militer, Studi Tentang budaya Politik*, Jakarta, LP3ES.
- Suyanto, Djoko. 2007. *Menuju TNI Profesional dan Dedikatif*. Jakarta: Puspen TNI.
- Syahnakri, Kiki. 2009. *Aku Hanya Tentara*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Tambunan, A.S. 1955. *Dwifungsi ABRI sebagai Konsep Politik, dalam Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Tentara Mendamba Mitra. 1999. Hasil Penelitian LIPI Tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI Dalam Kehidupan Kepartaian DI Indonesia, Bandung, MIZAN.

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia . 2010. Fokusindo Mandiri

Urbaningrum Anas. 1999. Ranjau-Ranjau Reformasi, Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Suharto, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Varma, SP. 1987. Teori Politik Modern, Jakarta, Rajawali Press.

Widjojo, Agus dkk. 2005. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta; Imparsial

Yulianto, Arif. 2002. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Daftar Makalah dan Skripsi

Bambang Yudhoyono, Susilo. Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer. Makalah dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer Jurusan Ilmu Politik- FISIP Universitas Indonesia Jakarta 24-25 Mei 1999 Gedung Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok

Juliani, E. 2008. Skripsi : Militer dan Politik (Studi Tentang Kelompok Pendukung dan Penentang Terhadap Penghapusan Dwi Fungsi ABRI Tahun 1998-2001. USU. Medan

Romli, L. 2001. Makalah : Militer Pasca Orde Baru

Wahyudi. 2012 . Makalah Kuliah : TNI dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia

C. Daftar Jurnal dan Koran

George Junus Aditjondro, dalam Jurnal Wacana Edisi 17 Tahun 2004, Jogjakarta, Insist Press .

Kompas, 30 September dan 1 Oktober 2002

Kompas, 26 November 2002

Media Indonesia 1 Oktober 2002

Republika. 26 April 2000 : Letjen TNI Agus Widjaya, Kepala Stat Teritorial TNI, Pokok-pokok pikiran dalam Suatu Seminar di Jakarta,.

Harian Republika, 26 April 2000 Kesimpulan Hasil RAPIM, TM. Tahun 2000.

Balai Pustaka, Kamus Bahasa Indonesia, 1990

Susilo Bambang Yudhoyono, profesionalitas TNI/ABRI dalam Dies Natalis Seskoad di Bandung, pada tanggal 25 Mei 1990.

D. Situs Internet

<http://pukes.tripod.com/dkss>

<http://brefiandromeda.blogspot.com/2011/06/peran-militer-era-sby-html>

<http://makalah-perkuliaah.blogspot.com/2012/12/tni-dalam-dinamika-perpolitikan.html>

<http://mirfana.wordpress.com/2013/07/12/hubungan-sipil-militer-di-Indonesia-pada-periode-pertama-kepemimpinan-susilo-bambang-yudhoyono/>

www.tni.mil.id

www.kontas.org/index.php?hal=siaran_pers&id=3